

Invensi Adat dalam Hegemoni Negara

Agus Indiyanto

Pengantar

Sejak Orde Baru ciri-ciri lokal telah mengalami subordinasi oleh kepentingan-kepentingan negara di bawah ideologi developmentalisme. Pengenalan dan penerapan ideologi negara yang dibawa oleh program-program pembangunan, khususnya dalam rangka pembentukan totalisme tatanan sosial politik, telah menyebabkan karakter lokal menghilang atau mengalami peminggiran secara sistematis. Tulisan ini berusaha menolak argumen yang menyatakan bahwa tekanan-tekanan negara melalui berbagai bentuk intervensinya telah memusnahkan institusi dan karakter lokal. Konflik hubungan antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*) ini ditunjukkan dalam tulisan ini justru telah melahirkan berbagai resistensi dalam bentuk-bentuk reinvensi dan revivalisme budaya lokal. Dengan mengacu pada berbagai proses reproduksi budaya dan identitas lokal di Minangkabau, makalah ini akan memperlihatkan bagaimana proses rekonstruksi keminangan terjadi sebagai gerakan penyediaan ruang publik oleh orang Minang bagi kaum Minang untuk menjamin proses pewarisan tradisi di satu pihak dan untuk memecahkan persoalan-persoalan praktis yang terus berubah di lain pihak.

Pembangunan dan Perubahan Sosial

Kuatnya hegemoni negara dalam beberapa dasawarsa terakhir dipandang oleh banyak ahli telah menyebabkan terjadinya proses marginalisasi institusi tradisional yang secara fungsional memiliki peranan sangat penting dalam memecahkan persoalan komunitas. Tidak adanya tokoh adat yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat menyebabkan konflik horisontal di berbagai daerah terus berlangsung berlarut-larut. Memudarnya gotong royong di Jawa (lihat Abdullah, 2001) menyebabkan masyarakat kehilangan keluwesan/fleksibilitas dalam menghadapi kondisi krisis. Beberapa penelitian mengenai jaminan sosial di berbagai konteks masyarakat dalam situasi krisis menunjukkan bahwa institusi-institusi lokal tradisional yang diperkirakan memiliki peran yang penting bagi penyelenggaraan jaminan sosial telah kehilangan daya resistensinya. Secara inheren, melemahnya peranan institusi sosial dan negara dalam memberikan

jaminan sosial untuk mengatasi krisis secara bersamaan menumbuhkan upaya-upaya untuk menjaga kelangsungan hidup yang lebih terpusat pada kelompok-kelompok kecil yang mandiri, yaitu rumah tangga (lihat Indiyanto, 2000).

Melemahnya atau menghilangnya peranan institusi lokal tradisional yang secara fungsional berguna untuk memecahkan persoalan komunitas tersebut oleh sebagian ahli dipandang sebagai 'risiko' dari proses integrasi masyarakat ke dalam suatu tatanan yang lebih luas. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya respons formatif, dimana masyarakat dengan cepat mengadopsi format praktik sosial baru yang dilegitimasi oleh sistem nilai dan sistem norma yang baru, sejalan dengan proses perubahan masyarakat yang terjadi secara meluas. Perubahan konteks masyarakat tersebut secara umum disebabkan oleh dua hal. Pertama, determinasi yang begitu kuat dari pemerintah melalui implementasi berbagai kebijakan pembangunan yang dilandasi oleh ideologi developmentalism. Proses pembangunan yang dilaksanakan pemerintah telah menjadi kekuatan penting yang mendorong masyarakat mengadopsi penataan sosial baru yang menuntut penyesuaian-penyesuaian nilai dan norma. Kedua, terintegrasinya masyarakat lokal ke dalam tatanan sistem pasar yang berdampak pada meluasnya jaringan sosial dan orientasi masyarakat (lihat Abdullah 1999). Perubahan-perubahan moderen dalam struktur produksi dan hubungan ekonomis serta migrasi memiliki peranan instrumental dalam proses perubahan hubungan kekerabatan (lihat Gough, 1962). Hal tersebut pada gilirannya tidak hanya mengaburkan ciri-ciri lokal akan tetapi juga mengubah bentuk-bentuk kewajiban sosial serta loyalitas antaranggota masyarakat akibat meluasnya batas-batas solidaritas sosial (lihat juga Abdullah, 2000).

Sejalan dengan itu, Hefner (1999) menegaskan bahwa Perubahan ekonomi merupakan suatu proses moral sekaligus material, yang tidak hanya mencakup perubahan mode produksi dan dinamika pendapatan akan tetapi juga perubahan identitas, aspirasi, dan otoritas. Transformasi ekonomi yang ditandai dengan integrasi masyarakat tradisional ke dalam tatanan sistem pasar menyebabkan terjadinya adanya reorganisasi aspek-aspek kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Integrasi masyarakat pedesaan ke dalam tatanan yang lebih luas tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran pusat orientasi dan kontrol ke luar dari suatu batas kultural (*cultural boundary*). Dengan demikian perubahan ekonomi pada dasarnya tidak hanya sekedar masalah penyebaran

teknologi, rasionalisasi pasar, atau ‘penetrasi kapitalis’ (Hefner 1990) akan tetapi tidak dapat dipisahkan dari suatu ‘perubahan integratif’ (Geertz 1973) yang telah menarik wilayah pinggiran ke dalam tatanan ekonomi, kultur, serta politik yang lebih luas.

Program pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru, menurut Hefner (1999), tidak lebih dari upaya untuk mendorong integrasi masyarakat ke dalam tatanan politik yang berciri patrimonialistik dan mendewakan ketunggalan. Berpedoman pada ‘pembangunan dan stabilitas keamanan’ pemerintah Orde Baru sejak awal pemerintahannya melakukan perombakan politik yang mendasar yang diarahkan untuk mengeliminir pengaruh partai politik lama dan meningkatkan loyalitas pada pemerintah. Dengan demikian kebijakan pembangunan yang diimplementasikan sengaja atau tidak disengaja dikonstruksi untuk kepentingan formasi negara dan pelestarian kekuasaan. Oleh karena itu, realitas sosial yang ada dalam masyarakat sekarang sebenarnya sarat dengan muatan politis. Kebijakan yang menempatkan masyarakat pedesaan sebagai massa mengambang, misalnya, sebenarnya tidak lebih dari peminggiran partai politik lama dan menempatkannya sebagai pemain pinggiran dalam kancah politik nasional yang didominasi militer. Sementara itu, pembangunan ekonomi secara lambat laun mempertajam diferensiasi di pedesaan, yang pada gilirannya menyebabkan masalah-masalah yang berhubungan dengan konsekuensi politik dan distribusional dari pembangunan (lihat Hefner 1999).

Penghancuran partai Komunis pada masa awal pemerintahan Orde Baru merupakan titik awal upaya membatasi aktifitas politik serta memperlemah dan mengalihkan solidaritas sosial. Label ‘kiri’, ‘komunis’, ‘bertentangan dengan Pancasila’ telah menjadi istilah yang cukup ampuh bagi pemerintah untuk memberangus lawan politik yang tidak sejalan dengan pemerintah. Pelarangan beberapa partai lama, konsolidasi partai politik dengan platform yang telah didomestifikasi, semuanya diarahkan untuk mengakhiri pluralisme politik dalam pemerintahan.

Proses reformasi kehidupan masyarakat terus meluas untuk mereduksi diversitas dalam segala bidang kehidupan. Salah satu aspek penting dalam formasi negara adalah pengakuan terhadap agama resmi yang diakui oleh pemerintah, dimana setiap penduduk dipaksa oleh Undang-Undang untuk menjadi penganut salah satu agama resmi tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk domestikasi oleh pemerintah untuk mengatasi

diversitas dalam dimensi religi. Dengan memeluk salah satu agama resmi tersebut masyarakat dengan sendirinya membangun keterikatan formal dengan organisasi religi pada tingkat nasional, yang itu penting dalam diseminasi pembaharuan ritual dan doktrinal yang mencerminkan kebijakan negara dalam masalah agama (lihat Hefner 1990).

Pengaruh negara dapat juga dilihat dalam kebijakan bahasa nasional yang telah menyebabkan bahasa daerah ter subordinasi dan itu, menurut Abdullah (2000) merupakan awal dari proses penjajahan identitas lokal karena, selain menyebabkan bahasa daerah tidak berkembang juga memberangus bahasa daerah dalam menyumbangkan ide dan nilai dalam pembentukan identitas nasional.

Pembangunan juga secara sistematis mengubah pengorganisasian ekonomi dalam masyarakat lokal, yang tidak hanya semakin meluas ke wilayah sekitar akan tetapi juga integrasi ke dalam tatanan sistem pasar pada lingkup nasional dan global. Perbaikan infrastruktur, intensifikasi pertanian yang berujung pada komodifikasi produksi pertanian, membanjirnya barang-barang konsumsi sejalan dengan meningkatnya pendapatan, serta migrasi ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kota) yang semakin intensif telah menjadi penyebab terjadinya diferensiasi dalam tatanan sosial masyarakat lokal (lihat Husken, 1998). Hal tersebut menimbulkan persoalan baru dalam identitas dan orientasi yang pada gilirannya mengubah bentuk dan basis kekuasaan dalam kehidupan masyarakat desa. Nilai-nilai tradisional yang menekankan kepedulian sosial dan solidaritas terhadap kelompok miskin telah berganti dengan nilai-nilai yang menekankan efisiensi dan maksimalisasi keuntungan.

Konsep desa yang disebarluaskan (diterapkan secara nasional) melalui UU no. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa sebenarnya merupakan *political construct* yang dibangun untuk kepentingan kekuasaan. Lembaga adat yang ada di berbagai tempat telah mengalami formalisasi dan distorsi yang meluas sehingga sebagai lembaga yang menampung persoalan publik mengalami pembiasan dan terkontaminasi oleh kepentingan penguasa, sehingga memusnahkan peran institusi sosial lokal dalam tatanan kehidupan sosial (lihat Abdullah 2001). Masyarakat tidak hanya terintegrasi pada sistem pemerintahan yang mengikuti standar nasional untuk melancarkan implementasi kebijakan pembangunan yang berlaku dalam lingkup nasional, harus mematuhi aturan

hukum negara, tetapi juga ‘dipaksa’ untuk menerima kepemimpinan formal yang seringkali telah ditentukan secara struktural dari atas. Hal tersebut selain menyebabkan melemahnya posisi masyarakat secara institusional.

Semua fakta di atas mengarahkan para peneliti kepada satu kesimpulan bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru telah menyebabkan pegebirian pranata sosial dan identitas lokal serta mengarahkannya pada pusat kekuasaan dan identitas yang baru, yaitu negara.

Adat dan Perubahan Sosial di Minangkabau

Isu adat, khususnya yang terstruktur sesuai dengan prinsip matrilineal, menempati posisi yang penting dalam wacana penelitian di Sumatera Barat (atau lebih khusus masyarakat Minangkabau) (lihat de Joselin de Jong 1980; F. von Benda-Beckmann 2000). Akan tetapi, tampak kecenderungan umum bahwa selama ini adat hanya ditempatkan sebagai konteks atau latarbelakang analisis, tanpa pernah mempersoalkan proses invensi maupun produksi/reproduksi sosial yang terjadi. Bahkan, lebih jauh lagi terdapat kecenderungan pemberian penekanan yang berlebihan dari para ahli terdahulu sehingga seakan-akan tidak ada prinsip tambahan dalam pengorganisasian masyarakat dalam kategori peringkat sosial dan politik (lihat von Benda-Beckmann, 2000).

Secara general, para ahli ilmu sosial yang meneliti masyarakat Minang sepakat bahwa pembangunan nasional tidak hanya menyebabkan perubahan yang signifikan di bidang ekonomi akan tetapi juga menyebabkan melemahnya institusi adat di Minangkabau. Hal ini didukung oleh beberapa hasil penelitian terbaru tentang jaminan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin di Sungai Tanang, misalnya, menunjukkan bahwa prinsip garis keturunan ibu yang berbasis keluarga luas tidak lagi memiliki peranan yang besar bagi pemberian jaminan sosial. Afrizal (2001) juga menunjukkan bahwa peranan keluarga luas dalam perawatan bagi lansia juga mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan prinsip-prinsip adat dipertanyakan efektifitasnya oleh Rahmadi (2001) dalam penyelesaian konflik yang berhubungan dengan sumber daya alam melalui pembangunan konsensus.

Paling tidak terdapat tiga bentuk perubahan sosial yang dapat diidentifikasi pada masyarakat Minangkabau kontemporer. Pertama, perubahan institusi lokal. Sebuah

contoh paling jelas mengenai intervensi negara terhadap institusi lokal di Minangkabau adalah implementasi UU no.5/1979 tentang pemerintahan desa. Reorganisasi pemerintahan dari sistem *nagari* ke sistem desa tidak hanya menyebabkan terpecahnya kesatuan adat menjadi beberapa wilayah administratif, akan tetapi juga menjadi penyebab memudarnya identitas adat. Lambat laun desa (sebagai representasi negara pada tingkat yang paling bawah) mengambil alih peranan adat sebagai penampung berbagai persoalan publik. *Kerapatan adat* dan kelompok *niniekmamak* yang semula tampil sebagai acuan dominan dalam pengaturan struktur sosial-politik dan hubungan *property* (von Benda-Beckmann 2000) kini tidak lagi menjadi acuan pokok bagi orang Minang dalam transfer sumber daya antargenerasi. Penggunaan hukum negara, di samping hukum adat dan agama di Minang, untuk mengajukan klaim atas tanah (lihat Biezeveld 2001) menjadi bukti semakin menguatnya hegemoni pemerintah secara institusional.

Kedua, kepatuhan terhadap nilai-nilai lama. Hal ini terjadi sejalan dengan terjadinya pergeseran kekuasaan yang mereduksi basis-basis kekuasaan tradisional *nagari*. Semakin lemahnya pengaruh agen-agen tradisional dalam proses enkulturasi dan sosialisasi dalam persaingannya dengan negara (*the state*) dan pasar (*market*) menyebabkan adat semakin kehilangan daya paksanya. Seperti yang juga terjadi di Jawa, modernisasi yang telah merasuk jauh ke pelosok pedesaan, sebagai respons atas terbukanya peluang ekonomi baru dalam lingkup nasional, telah menyebabkan timbulnya sistem dan hierarki sosial baru yang dilegitimasi sistem nilai dan norma baru.

Integrasi masyarakat Minang ke dalam tatanan pasar terjadi dalam dua alur, yaitu proses industrialisasi dan modernisasi di Sumatra Barat, dan kultur migrasi yang begitu kental pada masyarakat Minang. Menjamurnya berbagai pusat perbelanjaan yang selalu dipadati orang di pusat kota-kota di Sumatra Barat menjadi bukti betapa antusiasnya masyarakat menanggapi gaya hidup baru dan mengidentifikasikan diri sebagai bagian dari ‘masyarakat konsumsi yang baru’ (lihat Hefner 1990). Stratifikasi sosial pada saat itu sudah bukan lagi didasarkan pada ikon-ikon tradisional seperti keturunan atau kharisma, akan tetapi pada penguasaan atas kapital.

Perubahan di dalam nilai status dan kelas tersebut lambat laun ditanggapi oleh kelompok kelas menengah baru dengan simbol-simbol konsumsi, yang sebenarnya merupakan penegasan bagi pemisahan dari tatanan nilai dan sistem lama. Pemisahan dari

ikatan tradisional tersebut, sejalan dengan meningkatnya otoritas individual, menimbulkan bahaya dalam kehidupan sosial ketika kebebasan tersebut tidak diikuti dengan komitmen moral. Tradisi lambat laun kehilangan basis dalam penataan perilaku individual. Orang bebas berasosiasi dengan orang lain akan tetapi tidak berhasil membangun komitmen moral yang menjadi penghubung dengan orang lain dalam komunitas yang sebenarnya (Fukuyama 1999). Pada tingkat ini kontrol hanya berlaku pada unit terbatas, tidak pada tingkat komunitas yang berbasis nilai-nilai komunal (lihat Abdullah 2000). Kepedulian sosial pada tahap ini digantikan oleh nilai-nilai efisiensi dan maksimalisasi keuntungan.

Ketiga, transformasi pada unit keluarga. Sejalan dengan terintegrasinya masyarakat ke dalam tatanan negara dan sistem pasar yang kapitalistik peranan rumah tangga sebagai sebuah unit sosial yang mandiri menjadi semakin kuat. Keluarga luas yang tinggal bersama dalam satu rumah besar dan mengelola sumber daya secara bersama menjadi tidak populer. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari implementasi kebijakan pemerintah yang hampir semuanya berasumsi pada rumah tangga sebagai unit sosial terkecil maupun perubahan-perubahan dalam pola transfer *property/harato pusako*. Hal ini terlihat jelas dari berkurangnya peran *Tungganai* atau *penghulu Andiko* sebagai pemimpin dari sebuah paruk dalam transfer sumber daya dan peran tersebut mulai diambil alih oleh ayah pada kelompok keluarga *samande*. Dengan demikian peran *samande* sebagai satu kesatuan sosial ekonomi yang relatif otonom semakin menguat baik untuk paruk yang menggunakan sistem penguasaan tanah pada kelompok keluarga *samande* dengan *sistem bergiliran*, maupun *ganggam bauntuok*. Fragmentasi kepemilikan dan penguasaan tanah dan terbatasnya jumlah tanah pusaka yang ada dalam masyarakat, memberikan implikasi pada merenggangnya ikatan sosial ekonomi para anggota keluarga dari sebuah paruk. Tren pemisahan keluarga luas menjadi unit kecil yang otonom tersebut menimbulkan persoalan pelik terutama bagi loyalitas anak bagi orang tua maupun terhadap keluarga luasnya, khususnya yang berhubungan dengan pemberian jaminan sosial (lihat Erwin 2001).

Reinvensi Adat

Apa yang tampak pada masyarakat Minang saat ini sebenarnya bukanlah produk dari satu momentum sosial, melainkan implikasi dari berbagai proses sosial dalam sejarah panjang komunitas tersebut. Pergulatan yang panjang melawan pengaruh Eropa moderen dan Islam (lihat de Josselin de Jong, 1980) membentuk suatu masyarakat yang tidak hanya lebih terbuka tetapi juga lebih *tricky* dalam berinteraksi dengan pengaruh hegemoni negara dan pasar. Berbeda dengan orang Jawa yang di mana-mana suka membentuk paguyuban dan secara berkala mengadakan pertemuan untuk menegaskan kembali identitas ke-Jawa-annya, orang Minang kurang begitu suka berkelompok dan berbicara dalam bahasanya sendiri. Meskipun demikian, sedikitnya terdapat tiga hal yang menjadi representasi ke-Minang-an. Pertama, pada tataran simbol budaya, dimana identitas ke-Minang-an direpresentasikan dengan bentuk atap rumah yang menyerupai tanduk kerbau (*gonjong*). Revitalisasi bentuk atap yang mengikuti arsitektur *rumah gadang* tradisional pada bangunan-bangunan moderen, baik di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat, menunjukkan resistensi kultural yang luar biasa ketika berhadapan dengan kekuatan pasar. Perpaduan antara arsitektur moderen dan atap gonjong tersebut merupakan paradoks antara kebudayaan tradisional dan simbol-simbol modernitas yang muncul dalam simbol-simbol McDonalds dan Coca-Cola. Resistensi yang begitu kuat ini bisa jadi karena dilegitimasi oleh pemerintah daerah Sumatra Barat sejak tahun 1975 (lihat Nas dan Bakel 1999), sehingga ekspresi identitas etnis ini meluas penggunaannya tidak hanya di puncak-puncak gedung pemerintah akan tetapi sampai pada gerbang kampung bahkan boks-boks telepon.

Kedua, terdapatnya tren di kalangan pengusaha-pengusaha Minang yang berhasil di Jakarta atau di kota besar lainnya untuk menyelenggarakan perkawinan a la keluarga bangsawan Minangkabau di hotel-hotel berbintang. Sekali lagi ini menjadi indikator penting bagaimana orang mengkonsumsi aspek ritual/seremonial budaya lokal untuk mengidentifikasikan diri dalam konteks budaya global (lihat juga Friedman 1990) meskipun secara substansial tidak lagi dipatuhi secara penuh. Ritus-ritus Minang masih menjadi unsur penting dalam praktik sosial yang bahkan cenderung mengalami reproduksi secara meluas.

Ketiga, sejalan dengan melemahnya kontrol dari pemegang kekuasaan pemerintah pusat pada era reformasi ternyata membangkitkan kembali lembaga-lembaga adat yang

secara fungsional berperan dalam praktik pertukaran sosial. Seperti yang banyak dikemukakan oleh beberapa ahli Sumatra Barat, masyarakat kini mulia berani mengklaim hak-haknya dengan menggunakan baik jargon-jargon maupun institusi adat (lihat F. von Benda-Beckmann et al. 2001). Tren ini tampak jelas dalam beberapa kasus konflik atas sumberdaya alam

Ketiga bukti di atas, sekali lagi, di satu sisi memperkuat pandangan para ahli tentang pengaruh hegemoni budaya global terhadap masyarakat lokal. Proses globalisasi yang ditandai dengan serangkaian pergerakan atau aliran manusia, peralatan/mesin, kapital/uang, media komunikasi, dan ideologi (lihat Appadurai 1990) yang melalui batas-batas kultural telah menyebabkan transformasi mendasar dalam kehidupan masyarakat lokal. Akan tetapi tekanan yang begitu kuat dari negara melalui serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk mengontrol diversitas lokal dalam tatanan nasional bersama-sama dengan tekanan gaya hidup yang kapitalistik dalam konteks masyarakat Minang ternyata tidak mengarah pada homogenisasi atau radikalisasi budaya lokal akan tetapi membentuk ‘budaya ketiga’ yang bergerak tanpa acuan teritorial dan berusaha mengakomodasi berbagai ide yang mempengaruhinya.

Referensi

- Abdullah, I. 1999. ‘From Bounded System to Borderless Society’ dalam *Antropologi Indonesia No. 60 (XXIII)*. p. 11-18.
- Abdullah, I. 2000. ‘Kondisi Sosial Yang Dibayangi Disintegrasi Tanpa Ujung’ dalam Ninok Leksono (ed.) *Indonesia Abad XXI*. Jakarta: Kompas, p. 44-56.
- Abdullah, I. 2001 (forthcoming). ‘Teori dan Praktik Komunalisme: Krisis ekonomi, Sumber Daya Lokal dan Respon Sosial di Sriharjo, Yogyakarta’ dalam F. von Benda-Beckmann et al., (ed.) *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afrizal. 2001 (forthcoming). ‘Hubungan Keluarga, Manajemen Kekayaan, Perubahan Sosial dan Kesejahteraan Lanjut Usia di Minangkabau Matrilineal Kontemporer’ dalam F. von Benda-Beckmann et al., (ed.) *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Appadurai, A. 1990. ‘Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy’ dalam M. Featherstone (ed.) *Global Culture*. London: Sage.
- Von Benda-Beckmann, F. 2000. *Properti dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta: Grasindo.
- Biezeveld, R. 2001 (forthcoming) ‘Nagari, Negara dan Tanah Komunal di Sumatra Barat’ dalam F. von Benda-Beckmann et al., (ed.) *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Erwin. 2001 (forthcoming). 'Dinamika Pengorganisasian Jaminan Sosial dalam Keluarga pada Masyarakat Petani di Pedesaan Minangkabau: Studi kasus Masyarakat Desa Sungai Tanang, kabupaten Agam' dalam F. von Benda-Beckmann *et al.*, (ed.) *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, J. 1990. 'Being in the World: Globalization and Lokalization' dalam M. Featherstone (ed.) *Global Culture*. London: Sage.
- Fukuyama, F. 1999. *The Great Disruption*. New York: The Free Press.
- Geertz, C.1973. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Book.
- Gough, K. 1962. 'The Modern Disintegration of Matrilineal Descent Groups', dalam D.M. Schneider dan K. Gough (ed.) *Matrilineal Kinship*. Berkeley: University of California Press.
- Hefner, R. W. 1990. *The Political Economy of Mountain Java: An Interpretive History*. Berkeley: University of California Press.
- Hüsken, F. 1998. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman: Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta: Grasindo.
- Indiyanto, A. 2000. *Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Pangan Rumah Tangga Miskin di Jawa*. S-2 thesis. Unpublished.
- De Josselin de Jong, P.E. 1980. *Minangkabau and Negri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Nas, P.J.M. dan Martin A van Bakel (1999) ' Small Town Symbolism: The Meaning of the Built Environment in Bukittinggi and Payakumbuh' dalam B. Jezernik (ed.) *Urban Symbolism and Rituals*. Ljubljana. P. 173-189.
- Rahmadi, T. 2001 (forthcoming). 'Pendekatan Membangun Konsensus bagi Penyelesaian Sumber Daya Alam di Minangkabau dan Kerinci' dalam F. von Benda-Beckmann *et al.*, (ed.) *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.